

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2017

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SAMARINDA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) Tahun 2017 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban instansi/lembaga Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja disusun untuk memberikan gambaran hasil capaian kinerja atas target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja di awal tahun yang menggambarkan peran tugas dan fungsi serta capaian kinerja untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Informasi Laporan Kinerja ini dapat menjadi referensi utama untuk evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja BPBD KS di masa yang akan datang dalam mencapai Visi Misi SKPD dan Pemerintah Kota Samarinda di akhir tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021.

Dan akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran BPBD KS dalam memperbaiki kinerja, mendukung upaya percepatan reformasi birokrasi yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju zona integritas dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Bersama kitatanggap tangkas dan tangguh.

Samarinda,

Kepala Pelaksana,

Ir. Hery Suryansyah, MT
Nip. 19631224 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (BPBD KS) telah menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan khususnya pembangunan di bidang penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Sesuai amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, BPBD KS berkewajiban menyusun Laporan Kinerja untuk Tahun 2017. Yang juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada publik.

Pada tahun 2017 BPBD KS telah menetapkan 3 indikator kinerja yang juga merupakan indikator kinerja Pemerintah Kota Samarinda untuk mencapai sasaran yaitu :

1. Jumlah regulasi dalam pengurangan resiko bencana;
2. Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi; dan
3. Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana.

Melalui 6 program dan 15 kegiatan keseluruhan target indikator tersebut dapat direalisasikan 100%.

Demikian LAKIP ini disusun, semoga dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja BPBD KS. Bersama, kita tanggap tangkas dan tangguh.

Samarinda, Februari 2017

Kepala Pelaksana,

Ir. Hery Suryansyah, MT
NIP. 19631224 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
1. Tugas	2
2. Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	4
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	6
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	6
B. Akuntabilitas Keuangan.....	10
BAB IV.PENUTUP	12

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Secara umum kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, internasional, maupun pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai implementasi II dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, penanggulangan bencana telah ditetapkan menjadi salah satu Prioritas Pembangunan Nasional yaitu, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021, *“Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif”* menjadi agenda prioritas ke-6 yang harus ditangani secara tuntas dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda (selanjutnya disebut BPBD KS) dibentuk dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011, dengan tugas pokok penanganan penanggulangan bencana mencakup kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan rehabilitasi dan rekonstruksi yang optimal guna dapat meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011, tanggal 28 Juni 2011 BPBD KS merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana yang meliputi urusan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pada kondisi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dengan indikator target secara optimal meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, pemulihan dini dan pembangunan pasca bencana yang lebih baik.

2. Fungsi

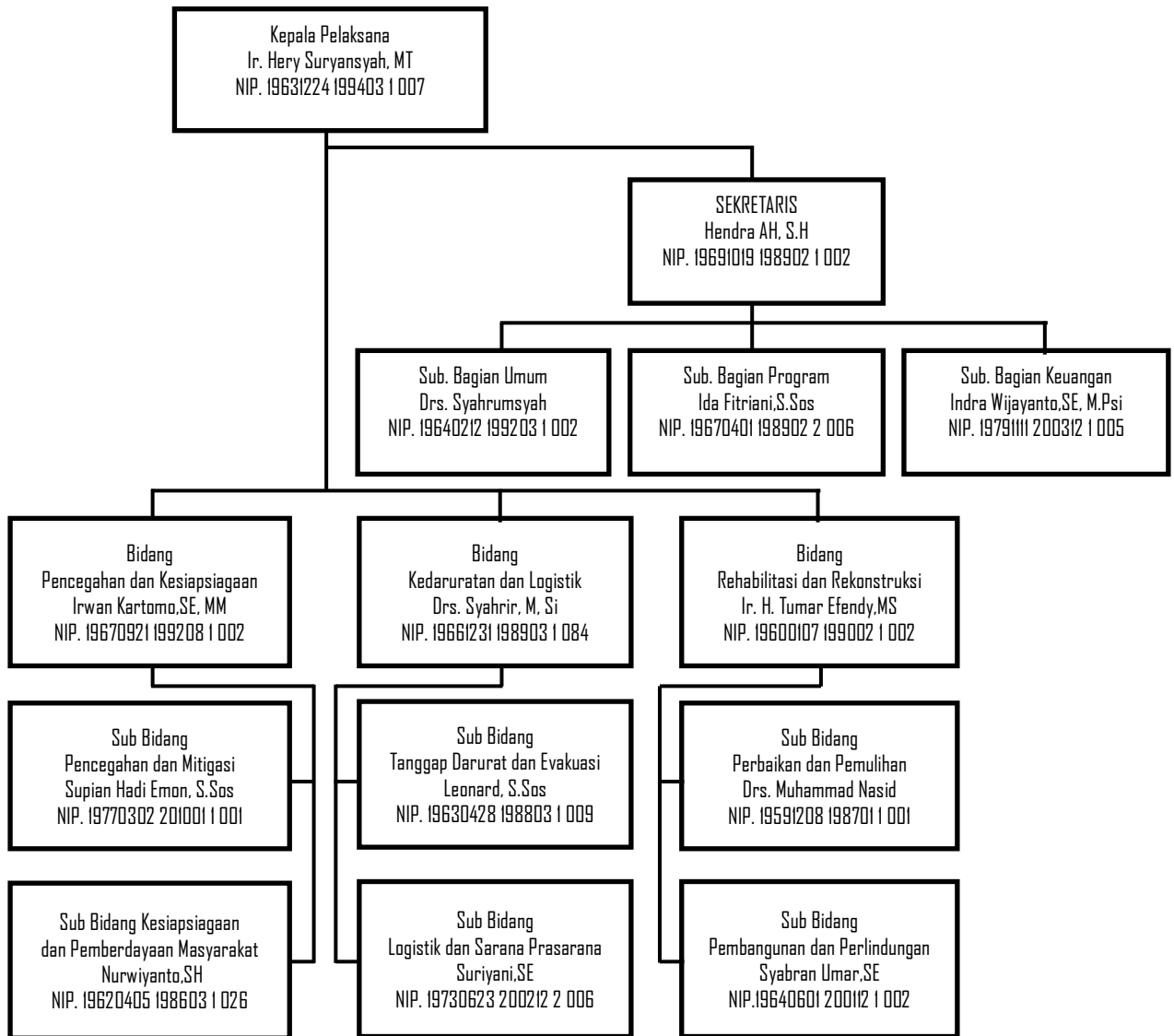
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, BPBD KS mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan penanggulangan bencana mencakup upaya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanganan darurat bencana dan evakuasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, pengendalian kepada masyarakat dan lembaga teknis dibidang pekerjaan umum khususnya penyelenggaraan penanganan bencana.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penyusunan dan penetapan protab penanggulangan bencana, kaji cepat, pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pertanggungjawaban keuangan.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi dijelaskan pada Gambar 1.1.dibawah.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBD Kota Samarinda

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana kinerja disusun berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Rencana kinerja tahunan dituangkan ke dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja dalam bentuk indikator kinerja dengan target tertentu untuk dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja setiap tahunnya. Penetapan Kinerja BPBD Kota Samarinda Tahun 2016 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja BPBD Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	100
2	Meningkatnya kualitas Aparatur penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	100
3	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	100

Ke-3 target indikator kinerja tersebut diatas dicapai melalui 6 Program yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 7 kegiatan.
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan alat tulis kantor
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor

- e. Penyediaan makanan dan minuman
 - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - g. Penyediaan jasa administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 3 kegiatan.
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor
 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 kegiatan.
 - a. Perencanaan program, pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPBD
 4. Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan 2 kegiatan.
 - a. Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - b. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
 5. Kedaruratan dan Logistik dengan 1 kegiatan.
 - a. Penyediaan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap
 6. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dengan 1 kegiatan.
 - a. Kaji Kebutuhan Pasca Bencana

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Berdasarkan RPJMD Kota Samarinda yang memulai periode perencanaannya dari tahun 2016 maka BPBD pun memulai Renstranya dari tahun 2016. Dibandingkan Renstra BPBD sebelumnya yaitu periode tahun 2011-2015, Renstra BPBD tahun 2016-2021 terdapat banyak perbedaan pada Visi Misi sampai dengan kegiatannya. Oleh sebab itu capaian kinerja pada periode Renstra 2011-2015 tidak dapat dijadikan pembandingan bagi capaian kinerja tahun 2016-2021.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPBD KS Kota Samarinda Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai mana terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Ditetapkannya aturan-aturan dalam penanggulangan bencana	Jumlah Regulasi dalam Pengurangan Resiko Bencana	100	95
2	Meningkatnya kualitas Aparatur penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur Kebencanaan yang memenuhi Standar Kualifikasi	100	100
3	Menguatnya kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana	100	70

Sementara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran BPBD Kota Samarinda Tahun 2016 dapat dilihat dari table 3.2 berikut ini :

Table.3.2. Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian			Keterangan
		B	C	K	
1	Tercapainya kelancaran pelayanan administrative	V	-	-	B = Baik (80-100) C = Cukup (50-79) K = Kurang (≤ 50)
2	Meningkatnya kecepatan dan ketepatan dalam penanggulangan bencana	V	-	-	
3	Mengurangi meluasnya kejadian bencana kebakaran	V	-	-	

SASARAN 1.

“TERCAPAINYA KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRATIF”

Tabel 3.3.Target dan Realisasi Indikator Sasaran 1.

Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Persentase terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan</i>	-	-	-	-	100	100

Untuk mewujudkan target dari indikator “*Persentase terpenuhinya pelayanan dalam mendukung kegiatan kebencanaan*” dilakukan melalui 4 Program dan 13 Kegiatan rutin. Dan berdasarkan realisasi target maka dapat disimpulkan bahwa hampir tidak ada kendala yang dapat menghambat pencapaian target tersebut.

SASARAN 2.

”MENINGKATNYA KECEPATAN DAN KETEPATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA”

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Indikator Sasaran 2.

Indikator	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
<i>Persentase respon time rate</i>	-	-	-	-	100	100

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian sertalangsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran. Sedangkan *Respon Time Rate* adalah rasio antara kejadian yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian secara keseluruhan.

Untuk mencapai target dari indikator “*Persentase respon time rate*” dilakukan melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yaitu dengan kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana dan kegiatan lain yang sesuai tupoksi BPBD (tidak dianggarkan). Pada kegiatan ini dilakukan apel siaga dan drill pemadam kebakaran yang melibatkan seluruh pasukan dari BPBD maupun dari PMK dan Balakarcana.

Berdasarkan realisasi target maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kendala dan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan maupun usaha pencapaian target.

SASARAN 2.

“MENGURANGI MELUASNYA KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN”

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Indikator Sasaran 2.

<i>Indikator</i>	<i>Tahun 2014</i>		<i>Tahun 2015</i>		<i>Tahun 2016</i>	
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>
<i>Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota</i>	-	-	-	-	100	100

2. Penanggulangan tanggap darurat bencana.

Pada kegiatan ini dilakukan tanggap darurat pada setiap kejadian bencana/kebakaran yang memerlukan tanggap darurat.

Penghitungan target dan realisasi dilakukan dengan membandingkan antara jumlah kejadian bencana/kebakaran yang dapat ditanggulangi oleh BPBD dengan seluruh kejadian bencana/kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari target 100 % semuanya dapat terpenuhi.

B. Akuntabilitas Keuangan

Rencana Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda tanggal 9 February 2017, BPBD Kota Samarinda mendapatkan anggaran yang terdiri dari Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 400.000.000,- dan Anggaran Belanja sebesar Rp. 24.999.807.715,-. Pada tanggal 23 Oktober 2017 melalui Anggaran Perubahan, Anggaran Belanja berkurang menjadi Rp. 23.344.231.220,- dan dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai : Rp. 6.870.570.235,-

2. Belanja Langsung

- Belanja Pegawai : Rp. 513.950.000,-

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 857.790.500,-

- Belanja Modal : Rp. 69.500.000,-

Realisasi Anggaran

Per 30 Desember 2016 anggaran yang terealisasi yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai : Rp. 12.739.673.091,- (93 %)

2. Belanja Langsung

- Belanja Pegawai : Rp. 2.335.825.000,- (95 %)

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.684.456.979,- (57 %)

- Belanja Modal : Rp. 4.103.858.800,- (98 %)

Rincian rencana dan realisasi anggaran BPBD untuk tahun 2017 per program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Rencana dan realisasi anggaran tahun 2017

No	Program	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<i>Non Program</i> Gaji dan Tunjangan	6.870.570.235,-	6.870.570.235,-	100
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	694.855.000,-	694.855.000,-	100
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	346.385.500,-	346.385.500,-	100
5	Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	100.000.000,-	100.000.000,-	100
6	Prog. Pencegahan dan Kesiapsiagaan	100.000.000,-	100.000.000,-	98
7	Prog. Kedaruratan dan Logistik	100.000.000,-	100.000.000,-	100
8	Prog. Rehabilitasi dan Rekontruksi	100.000.000,-	100.000.000,-	100

BAB IV. PENUTUP

Secara keseluruhan dari target-target yang ditetapkan di dalam penetapan kinerja telah dapat dicapai oleh BPBD Kota Samarinda dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Samarinda sudah bekerja sesuai dengan rencana. Adapun beberapa kendala yang dihadapi secara umum dapat diatasi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan baik itu sumber daya manusianya, regulasi, sarana prasarana, dan pendanaan yang cukup dapat lebih meningkatkan capaian yang lebih baik lagi. Perubahan-perubahan juga akan dilakukan terhadap perencanaan agar tercipta rencana yang benar-benar strategis dan tepat serta sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesiapsiagaan dan pencegahan penanggulangan bencana baik saat pra bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Akhirnya, bersama kita “Tanggap Tangkas Tangguh” dalam setiap penanggulangan bencana.

Samarinda, Februari 2017

TIM PENYUSUN